RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN TANJUNGANOM

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Tanjunganom, 2021

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. CAMAT TANJUNGANOM
Sekretaris Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

Drs. SUJITO, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700320 199101 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjunganom (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, sosial budaya dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator,

serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :

    a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal ;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
r. Pearturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

s. Praturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahu 2010 – 2030;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
u. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
w. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
x. Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor : 050/2650/411.401/2021 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023:

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tanjunganom guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Tanjunganom.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

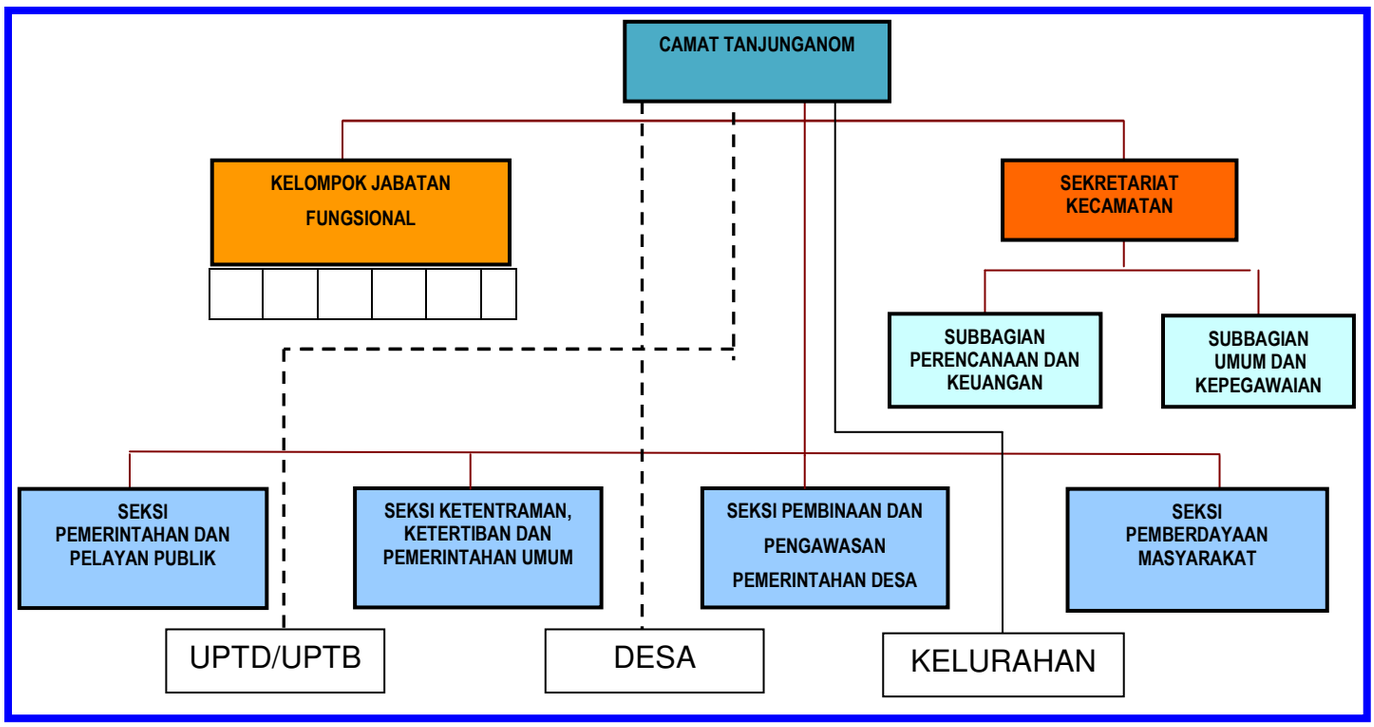
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
   i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan TanjunganomKabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakanpengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakanpeningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakanperencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakanfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakanpeningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakanpengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakanpemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakanfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umummempunyai tugas :

a. melaksanakanpembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakankoordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

e. melaksanakanfasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakanpembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakanpembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakanpenanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakanfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakanfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakanfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakanfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakanfasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakanfasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakanfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k. melaksanakanfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakanfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

g.Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugasmelaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c. melaksanakanpemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d. melaksanakanurusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakanpemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a. melaksanakanpembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;

c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakanpembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
e. melaksanakanpembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
f. melaksanakanpenanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
f. melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
g. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Tanjunganom adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 18 (Delapan belas), yang terisi sebanyak 11 (sebelas) jabatan struktural dan dibantu oleh 17 (Tujuh belas) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	9

7.	THL	3
8.	Lurah/KaKel	2
9.	Sekkel	-
10.	Kasi Kel.	2
11.	Staf Kel	8
12.	THL Kel	8
	Jumlah	**39**

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Tanjunganomsebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan 2 Kelurahan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	7
3.	Penata	III/c	2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata MudaI	III/a	1
6.	Pengatur Tinkgkat I	II/d	7
7.	Pengatur	II/c	5
8.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
9.	Juru Tingkat I	I/d	1
Jumlah			**28**

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Tanjunganom dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan Kelurahan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	8
3.	D3	1
4.	SMA	11

5.	SMP	4
6.	SD	1
JUMLAH		**28**

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor 1 (satu) bidang;
2. Gedung Pendopo Pertemuan 1
3. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Rumah Dinas 1 unit
5. Gedung PKK 1 Unit
6. Gardu Pos Jaga Sat Pol PP.
7. Musholla
8. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat1 (satu) buah yaitu 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013
   - Roda dua (dua)Unit yaitu Honda Supra Tahun 2006 dan Yamaha Vixon 2016
9. Peralatan inventarislainnya kantor Kecamatan dan Kelurahan dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 20 buah
   - Meja layanan : 3 buah
   - Kursi : 40 buah
   - Bangku Panjang : 4 buah
   - Kursi stainlist : 35 buah
   - Kursi plastik : 50 buah
   - Meja kursi tamu : 2 unit
   - Sound sistem : 1 set
   - Televisi : 1 unit
   - Komputer khusus KTP SIAK : 1 unit
   - Komputer e-KTP : 2 unit (depdagri)
   - Laptop : 4 unit
   - Printer : 7 unit

- Telepon/fax : 1 unit
- Genset listrik : 1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjunganom dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**	**974**	**1057**	**1079**	**1179**	**1280**	**97,4%**	**97,8%**	**98,09%**	**98,17%**	**98,33%**
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	186	177	183	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator "*Jumlah Pelayanan Umum",* realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan "*excellent service*" (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator "Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi", pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananKecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.479.000	68.291.200	70.429.000	70.429.000	81.929.000	76.314.485	66.586.035	68.446.322	68.446.322	76.047.334	96,02	97,50	97,18	697,18	92,82	15,52	19,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	194.521.000	96.963.800	66.836.000	66.836.000	71.136.000	194.344.000	91.825.800	66.836.000	66.836.000	71.136.000	99,91	94,70	100	100	100	18,79	19,78
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.260.000	100	100	100	100	36	8,57	17,44
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	94.000.000	219.018.400	305.521.800	305.821.800	232.218.400	94.000.000	217.520.400	303.910.800	305.821.800	217.818.900	100	99,32	99,47	99,47	93,80	26,34	19,68
5	Peningkatan Kinerja Kelurahan	-	-	-	-	1.048.003.200	-	-	-	-	1.035.403.403	-	-	-	-	98,80	-	-

Sumber : LRA Kecamatan TANJUNGANOM 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

2.4.1. Tantangan

a. Kecamatan Tanjunganom lebih dominan sebagai wilayah pertanian juga dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya perdagangan yang makin pesat,arus lalu lintas semakin padat dan pengaruh dari luar daerah dapat masuk dengan cepat yang membawa dampak baik positif maupun negatif di masyarakat KecamatanTanjunganom.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah sehingga menuntut perencanaan akan pembangunan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tanjunganomharus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
f. Masih perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah;
g. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
h. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Tanjunganom.

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Tanjunganom dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tanjunganom untuk memacu dan

memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tanjunganomdalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjunganom;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tanjunganom, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tanjunganom;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.
j. Pembangunan infrastruktur jembatan sebagai penghubung antar kabupaten yang dapat memacu roda perekonomian masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom.

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjunganommenggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tanjunganom;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Tanjunganom yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pegawai/aparatur di OPD Kecamatan Tanjunganomyang belum memadai, terutama sebagai staf pelaksana yang jumlahnya masih sangat kurang ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Banyaknyausulan perencanaan pembangunan lewat musrenbang sehingga membutuhkan anggaran biaya yang besar, menyebabkan beberapa perencanaan program kegiatan pembangunan tidak terlaksana pada waktu yang telah direncanakan;
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tanjunganom;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdaya an masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh

pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Tanjunganom sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Tanjunganom dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di **misi ke-2 (dua**). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Tanjunganom memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanjunganom, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan RenstraKementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Disamping menelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjunganom harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Tanjunganomtermasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Tanjunganom sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Tanjunganom termasuk jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Tanjunganom sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Baron dan merupakan jalan penghubung dengan jalan provinsi di Kabupaten Kediri melalui Warujayeng – Kediri.
c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Tanjunganom dilalui oleh aliran sungai Brantas melalui bendung gerak yang ada disebelah selatan Kecamatan Prambon dan sungai ini melintasi wilayah Kecamatan Tanjunganom yang berakibat juga rawan banjir
d. Kawasan peruntukan pertanian khususnya hortikultura (Pasal 28). Salah satu adalah sentra pembibitan yang berada di Desa Kedungrejo dan Warujayeng dan Sonobekel.
e. Kawasan peruntukan perindustrian kecil dan menengah, yaitu dengan adanya sentra industri bata merah di Lingkungan Gambirejo Kelurahan Warujayeng dan industri menengah lainnya di Desa Sambirejo.
f. Kawasan perdagangan kecil dan menengah di sepanjang jalur Barong – Warujayeng dan Warujayeng/Tanjunganom sampai dengan perbatasan Kecamatan Prambon.

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Tanjunganom menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah

Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Tanjunganommerupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Tanjunganom yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Tanjunganom menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Tanjunganom dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Tanjunganom dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Tanjunganom mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun **Tujuan Strategi** Pemerintah Kecamatan Tanjunganom adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan untuk tujuan strategi yang dimaksud, maka sasaran-sasaran yang diharapkan antara lain :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survey kepuasan masyarakat.

b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
   Indikator :
   a. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan,pembangunan,perekonomian,ketentraman dan ketertiban Umum Kesejahteraan Sodial dan Sarana Prasarana;
   b. Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun uraian diatas dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjunganom 2019-2023

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2475	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,09	83,3	83,5	83,6	83,7	83,8	83,8
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial& Sarana prasarana	91,75	92,25	92,75	93,25	93,75	94,50	94,50
						Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Tanjunganomdalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2.Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Tanjunganom, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :(Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : 2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	• Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	• Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
		• Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa.
			• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanjunganomselama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanjunganom. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjunganomakan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Peningkatan Kinerja Kelurahan
8. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	1	01	01		***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***	80	80	76.429.000	82	126.800.000	-	'	-	'	-	'	-	'	*Kec TANJUNGANOM*	*TANJUNGANOM*
			1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	12 bln	12 bln	-	12 bln	1.800.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bln	12 bln	14.868.000	12 bln	16.868.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	01	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	12 bln	6.851.000	12 bln	8.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	1.500.000	12 bln	3.500.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia					2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia					2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	01	07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	12 bln	12 bln	14.210.000	12 bln	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bln	12 bln	15.000,000	12 bln	22.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	01	09	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bln	12 bln	24.000.000	12 bln	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	01	10	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bln	12 bln	-	12 bln	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang ter arsip dengan baik	0			5 dokumen	12.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'			
			1	01	01	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis	-	0	0	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	***01***	***02***		***Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Prosentase sarana/prasarana layak fungsi***	80%	80%	80.976.200	80%	130.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'	Kec TANJUNGANOM	TANJUNGANOM
			1	01	02	01	Pengadagaan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun	0	0	0	0	0	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	4 jenis	7 unit	4.500.000	6 unit	26.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	02	03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	2 Jenis	5 unit	6.500.000	6 Unit	22.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	04	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	1 Jenis	30	7.000.000	1 set	5.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	05	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	32.745.200	3 unit	36.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	06	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 kendraan	3 kendraan	19.000.000	3 kendraan	28.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	07	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	6.551.000	4 jenis	5.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	02	08	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	4.680.000	3 jenis	4.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	02	09	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Jumlah mebeler yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	02	10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	***01***	***03***		***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***	***Tingkat kehadiran ASN***	***100 %***	***100 %***	***0***	***100%***	***10.200.000***	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	03	01	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	5.500000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	03	02	Penyediaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	3.500000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	03	03	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam yang mendapat honor	4 orang	0	0	4 org	1.200000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	05		***Program Peningkatan Kapasitas Aparatur***	***Persentase Pegawai dengan kategori nilai SKP 'Baik"***	***100 %***	***100 %***		***100%***	***15.000.000***	-	'	-	'	-	'	-	'	***Kec TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	05	01	Peningkatan wawasan Aparatur Kecamatan	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	22 org	22 org		22 org	15.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	***01***	***04***		***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun***	***6 Dok***	***6 Dok***	***3.500.000***	***6 dok***	***6.000.000***	-	'	-	'	-	'	-	'	***Kec TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	04	03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraa	1	01	06		***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan***	***Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat***	***40 Koordinasi***	***45 Koordinasi***	***309.500.000***	***45 Koordinasi***	***309.500.000***	-	-	-	-	-	-	-	-	***Kec. TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	06	01	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Data profil /Monografi yang tersusun, Laporan Bidang pemerintahan yang tersusun, Jumlah Publikasi Kegiatan Kecamatan	3 jenis	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		n masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	01	06	02	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	4 Keg	5 Keg	25.000.000	5 Keg	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	06	03	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	2 Keg	4 Keg	24.000.000	4 Keg	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	06	04	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	4 Keg	5 Keg	10.000.000	5 Keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	06	05	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	4 keg	5 Keg	66.000.000	5 Keg	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	06	06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	10 program	10 program	12.000.000	10 program	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	01	06	07	Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Keg	3 Keg	30.000.000	3 Keg	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	06	08	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu	16 desa/kel	16 desa/kel	43.000.000	16 desa/kel	43.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang melakukan tata kelola yang baik	*1*	*01*	*07*		***Program Pembinaan Desa/Kelurahan***	***Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa***	***75%***	***85%***	***65.000.000***	***90%***	***67.500.000***	-	'	-	'	-	'	-	'	***Kcc. TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	07	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Tertib administrasi	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Menyusun APB Desa	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
								-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Menyusun PKT, LPT	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	01	07	02	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan	20.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Melaksanakan Musrenbang	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Menyusun profil desa/kelurahan	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
								-Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	16 desa/ kelurahan	1616 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	0 1	0 7	0 3	Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan	10.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								- Membentuk Desa tangguh bencana	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Melaksanakan pembinaan Linmas	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
			1	0 1	0 7	0 4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan	10.000.000	16 desa/kelurahan	12.500.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
								-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
								-Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/kelurahan		-	'	-	'	-	'	-	'		
							Peningkatan Kinerja Kelurahan Tanjunganom							-	'	-	'	-	'	-	'		
							Penyediaan Operasional Perkantoran					12 bulan	378.754.700	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan	50.800.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Pemberdayaan masyarakat kelurahan					12 bulan	33.441.000	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan					12 bulan	319.500.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Peningkatan Kinerja Kelurahan Warujayeng							-	'	-	'	-	'	-	'		
							Penyediaan Operasional Perkantoran					12 bulan	578.660.500	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan	25.000.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Pemberdayaan masyarakat kelurahan					12 bulan	246.250.000	-	'	-	'	-	'	-	'		
							Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan					12 bulan	195.154.136	-	'	-	'	-	'	-	'		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	7	01	01			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA***		12 bln	-		-		12 bln	4.014392990	12 bln	4.316.530.950	12 bln	4.516.530.950	12 bln		*Kec TANJUNGANOM*	*TANJUNGANOM*
			7	01	01	201		Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	12 bln	-	-	-	-	12 bln	950.000	12 bulan	1.200.000	12 bln	1.500.000	12 bln			
			7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	12 bln					12 bln	950.000	12 bulan	1.200.000	12 bln	1.500.000	12 bln			
			7	01	01	202		Administrasi keuangan Perangakat Daerah	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD	12 bln	-	-	-	-	12 bln	3.749.214.600	12 bln	3.873.013.000	12 bln	3.973.013.000	12 bln			
			7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln					12 bln	3.746.687.000	12 bln	3.873.013.000	12 bln	3.973.013.000	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7 01 01 202 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediaanya Laporan Keuangan SKPD						12 bln	2.527.600	12 bln	2.527.600	12 bln	2.527.600	12 bln			
			7 01 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediaanya Laporan Kinerja dan Disiplin Pegawai	98%	-	-	-	-	98%	9.600.000	98%	4.800.000	98%	9.600.000	98%			
			7 01 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya ASN yang sehat	98%					98%	9.600.000	98%	4.800.000	98%	9.600.000	98%			
			7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya kebutuhan administrasi umum SKPD	12 bln	-	-	-	-	12 bln	65.354.350	12 bln	97.517.400	12 bln	105.517.400	12 bln			
			7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Komponen listrik/Penerangan Bangunan	96%					96%	3.532.600	96%	2.429.100	96%		96%			
			7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupi kebutuhan pelayanan dan administrasi perkantoran	98%					98%	26.195.250	98%		98%		98%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupi kebutuhan barang cetakan dan pengganddan kantor kecamatan	98%					98%	3.000.000	98%		98%		98%			
			7 01 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln					12 bln	3.600.000	12 bln		12 bln		12 bln			
			7 01 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupi fasilitas kunjungan tamu	97%					97%	1.197.500	97%		97%		97%			
			7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	95%					95%	24.829.000	95%		95%		95%			
			7 01 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedia Petugas pentatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12 bln					12 bln	3.000.000	12 bln		12 bln		12 bln			
			7 01 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	95%	-	-	-	-	95%	48.210.130	95%	55.471.827	95%	59.471.827	95%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Terlaksana pengadaan meubeler kantor kecamatan	12 bln					12 bln	11.520.040	12 bln		12 bln		12 bln			
			7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	Terlaksana pengadaan peralatan dan mesiin lainnya	12 bln					12 bln	36.690.090	12 bln		12 bln					
			7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya jasa penunjang SKPD	12 bln	-	-	-	-	12 bln	25.130.000	12 bln	196.290.000	12 bln	206.500.000	12 bln			
			7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya Jasa Surat Menyurat	95%					95%	3.150.000	95%		95%		95%			
			7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln					12 bln	21.980.000	12 bln		12 bln		12 bln			
			7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana barang milik daerah	12 bln	-	-	-	-	12 bln	130.523.100	12 bln	144.387.450	12 bln	154.387.450	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln					12 bln	35.112.850	12 bln		12 bln		12 bln			
			7	01	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	98%					98%	4.000.000	98%		98%		98%			
			7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98%					98%	19.000.000	98%		98%		98%			
			7	01	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	98%					98%	72.410.250	98%		98%		98%			
			7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12 bln	107.226.800	12 bln	88.800.000	12 bln	98.000.000	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal	12 bln	-	'	-	'	12 bln	90.900.000	12 bln	88.800.000	12 bln	98.000.000	12 bln			
			7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan optimasi pendapatan daerah	16 desa /kelurahan					16 desa/ kelurahan	90.900.000	16 desa/ kelurahan	88.800.000	16 desa/ kelurahan	98.000.000	16 desa/ kelurahan			
			7	01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	12 bln	-	'	-	'	12 bln	10.488.400	12 bln	0	12 bln	0	12 bln			
			7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana/Tercukupi kebutuhan bahan cetak/Tersedia Belanja mamin rapat koordinasi	100 %					100%	10.488.400	100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yan Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	12 bln	-	-	-	-	12 bln	5.838.400	12 bln	0	12 bln	0	12 bln			
			7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	12 bln					12 bln	5.838.400	12 bln	0	12 bln	0	12 bln			
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							12 bln	47.724.900	12 bln	938.866.800	12 bln	948.866.800	12 bln			
			7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 bln	-	-	-	-	12 bln	47.724.900	12 bln	49.500.000	12 bln	374.000.000	12 bln		Kec TANJUNGANOM	TANJUNGANOM
			7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 bln					12 bln	31.089.700	12 bln	32.000.000	12 bln		12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan PKK Tingkat Kecamatan	12 bln					12 bln	16.635.200	12 bln	17.500.000	12 bln						
			7	01	03	202		***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***										12 bln	514.547.100	12 bln	521.547.10	12 bln			
			7	01	03	203		***Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***										12 bln	408.705.600	12 bln	413.705.600	12 bln			
			7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12 bln					12 bln	22.913.400	12 bln	5.725.000	12 bln	6.25.000	12 bln			
			7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	12 bln					12 bln	22.913.400	12 bln	22.913.400	12 bln	6.25.000	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	12 bln					12 bln	22.913.400	12 bln	22.913.400	12 bln	6.25.000	12 bln			
			7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							12 bln	11.727.000	12 bln	6.272.500	12 bln	6.25.000	12 bln			
			7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	12 bln					12 bln	11.727.000	12 bln	6.272.500	12 bln	6.272.500	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	12 bln					12 bln	11.727.000	12 bln	6.272.500	12 bln	6.272.500	12 bln			
			7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA							12 bln	32.039.950	12 bln	14.501.800	12 bln	16.501.800	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	06	201		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 bln					12 bln	32.039.950	12 bln	14.501.800	12 bln	16.501.800	12 bln			
			7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan pengawasan	90%					90 %	14.191.100	90 %	2.025.000	90 %	3.025.000	90 %			
			7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersedia belanja operasional lembaga kamsyarakatan	95%					95%	17.848.850	95%	13.589.100	95%	14.589.100	95%			
KELURAHAN TANJUNGANOM																								
			7					***UNSUR KEWILAYAHAN***																	
			7	***01***				***KECAMATAN***								***608.870.200***								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	***01***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA***									***127.869.000***							
			7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyerapan anggaran	94%					94%	15.100.000	94%	16.100.000	94%	17.100.000	94%			
			7	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase penyerapan anggaran	94%					94%	15.100.000	94%	16.100.000	94%	17.100.000	94%			
			7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya kebutuhan administrasi umum SKPD	12 bln					12 bln	18.354.700	12 bln	19.354.700	12 bln	20.354.700	12 bln			
			7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia anggaran belanja komponen listrik	12 bln					12 bln	4.290.000	12 bln	4.290.000	12 bln	5.290.000	12 bln			
			7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia anggaran belanja logistik kebutuhan kantor	12 bln					12 bln	8.223.100	12 bln	9.223.100	12 bln	8.223.100	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia anggaran belanja cetak dan penggandaan	12 bln					12 bln	3.000.000	12 bln	3.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln			
			7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia anggaran belanja bahan bacaan	12 bln					12 bln	1.800.0000	12 bln	1.800.0000	12 bln	1.800.0000	12 bln			
			7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia anggaran belanja peralatan dan mesin lainnya	12 bln					12 bln	4.604.300	12 bln	5.604.300	12 bln	5.604.300	12 bln			
			7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia anggaran belanja peralatan dan mesin lainnya	12 bln					12 bln	4.604.300	12 bln	5.604.300	12 bln	5.604.300	12 bln			
			7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln					12 bln	82.950.000	12 bln	83.950.000	12 bln	84.950.000	12 bln			
			7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia anggaran belanja barang/jasa surat menyurat	12 bln					12 bln	450.000	12 bln	450.000	12 bln	450.000	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia anggaran belanja jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bln					12 bln	10.500.000	12 bln	10.500.000	12 bln	10.500.000	12 bln			
			7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia anggaran belanja jasa pelayanan umum kantor	12 bln					12 bln	72.000.000	12 bln	73.000.000	12 bln	74.000.000	12 bln			
			7 01 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln					12 bln	6.860.000	12 bln	7.860.000	12 bln	8.860.000	12 bln			
			7 01 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas kelurahan	12 bln					12 bln	3.545.500	12 bln	4.545.500	12 bln	3.545.500	12 bln			
			7 01 01 209 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedia anggaran belanja pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	12 bln					12 bln	3.314.500	12 bln	3.314.500	12 bln	5.314.500	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
			7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	349.500.100	12 bln	350.500.100	12 bln	350.500.100	12 bln			
			7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	120.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln			
			7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	34.985.100	12 bln	34.985.100	12 bln	34.985.100	12 bln			
			7	01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		12 bln					12 bln	131.501.100	12 bln	131.501.100	12 bln	131.501.100	12 bln			
			7	01	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedia anggaran belanja peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan	12 bln					12 bln	131.501.100	12 bln	131.501.100	12 bln	131.501.100	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
KELURAHAN WARUJAYENG																								
			7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		12 bln					12 bln	171.432.265	12 bln		12 bln		12 bln			
			7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia Anggaran Belanja Penatausahaan Keuanga	12 bln					12 bln	23.400.000	12 bln	24.400.000	12 bln	24.400.000	12 bln			
			7	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedia Anggaran Belanja Penatausahaan Keuanga	12 bln					12 bln	23.400.000	12 bln	24.400.000	12 bln	24.400.000	12 bln			
			7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah							12 bln	27.072.600	12 bln	28.072.600	12 bln	29.072.600	12 bln			
			7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	12 bln					12 bln	2.998.800	12 bln	3.998.800	12 bln	3.998.800	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %					98 %	19.944.150	98 %	19.944.150	98 %	20.944.150	98 %			
			7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia Anggaran Belanja Cetak / Penggandaan	12 bln					12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln			
			7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 bln					12 bln	5.525.000	12 bln	6.525.000	12 bln	7.525.000	12 bln			
			7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Anggaran Belanja Peralatan dan mesin lainnya	12 bln					12 bln	5.525.000	12 bln	6.525.000	12 bln	7.525.000	12 bln			
			7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Anggaran Belanja Jasa komunikasi, listrik dan air	12 bln					12 bln	86.600.000	12 bln	87.600.000	12 bln	89.600.000	12 bln			
			7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Anggaran Belanja Jasa komunikasi, listrik dan air	12 bln					12 bln	14.600.000	12 bln	14.600.000	12 bln	14.600.000	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln					12 bln	72.000.000	12 bln	73.000.000	12 bln	74.000.000	12 bln			
			7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln					12 bln	28.834.665	12 bln	29.834.665	12 bln	30.834.665	12 bln			
			7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Anggaran Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas kelurahan Kantor	12 bln					12 bln	4.825.200	12 bln	4.825.200	12 bln	4.825.200	12 bln			
			7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Anggaran Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bln					12 bln	14.500.000	12 bln	14.500.000	12 bln	15.500.000	12 bln			
			7	01	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedia Anggaran Belanja Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bln					12 bln	9.509.465	12 bln	10.509.465	12 bln	11.509.465	12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12 bln					12 bln	641.293.905	12 bln		12 bln		12 bln			
			7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	349.943.905	12 bln	350.943.905	12 bln	350.943.905	12 bln			
			7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	339.295.905	12 bln	339.295.905	12 bln	339.295.905	12 bln			
			7	01	03	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat	12 bln					12 bln	10.648.000	12 bln	11.648.000	12 bln	11.648.000	12 bln			
			7	01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedia Anggaran Belanja peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan	12 bln					12 bln	291.350.000	12 bln	292.350.000	12 bln	294.350.000	12 bln			
			7	01	03	203	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedia Anggaran Belanja peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan	12 bln					12 bln	291.350.000	12 bln	292.350.000	12 bln	294.350.000	12 bln			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja dari dokumen ini terdiri dari2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Dan adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Tanjunganom adalah *"Nilai Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan"*

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Tanjunganom adalah

1. Aspek kesejahteraan
2. Aspek pemberdayaan
3. Aspek perekonomian
4. Aspek perencanaan
5. Aspek Hukum
6. Aspek PKK
7. Aspek Tramtib
8. Aspek Pemerintahan
9. Aspek Inovasi

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjunganom

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasikan kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Tramtib 8. Aspek Pemerintahan 9. Aspek Inovasi	N/A	2380	2420	2450	2480	2500	2500

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Tanjunganom adalah :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
c. Tingkat kehadiran ASN
d. Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
e. Rata-rata nilai SKP
f. Persentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tanjunganom

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83 %	83 %	84 %	85 %	86 %	88 %	88 %
2	Prosentase Sarana / prasarana yang layak fungsi	$\frac{\sum \ Prasarana\ layak\ fungsi}{\sum \ Sarana\ dan\ Prasarana} x100\ \%$	90 %	93 %	95 %	95 %	96 %	97 %	97 %
3.	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \ kehadiran\ ASN}{\sum \ ASN} \times 100$	94	95	95	96	96	97	97
4.	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \ Lap.kinerja\&lap.keuangan\ yg\ tepat\ waktu}{\sum \ Seluruh\ laporan\ kinerja\ dan\ keuangan\ yg\ disusun} x100\ \%$	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase ASN dengan kategori nilai SKP “Baik”	$\frac{\sum \ ASN\ dgn\ nilai\ SKP\ "Baik"}{\sum \ ASN} x100\ \%$	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum \ Koordinasi\ yg\ ditindak\ lanjuti}{\sum \ Jml.Seluruh\ koordinasi} x100\ \%$	88	90	92	93	94	95	95
7.	Tingkat efektifitas Pembinaan Desa/kelurahan	$\frac{\sum \ Pembinaan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum \ Seluruh\ pembinaan} x100\ \%$	90	92	93	94	96	96	96

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tanjunganom dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.